

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)**

*THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE CAPACITY, APPLICATION OF  
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, UTILIZATION OF  
INFORMATION TECHNOLOGY, INTERN CONTROL SYSTEM, AND  
FINANCIAL SUPERVISION ON THE QUALITY OF INFORMATION ON  
REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS*

*(Survey on the Work Unit of the Brebes District Device)*



Oleh

**DADANG IRAWAN**

**20150420318**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes)

Dadang Irawan (20150420318)

Mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB UMY

[dadangirawan0@gmail.com](mailto:dadangirawan0@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to test and prove empirically the effect of human resource capacity, the application of government accounting standards, utilization of information technology, internal control systems, and financial supervision of the quality of information on financial statements of local governments. The problem in this study is that the quality of local government financial statement information is still not evenly distributed and the level of compliance with laws and regulations regarding local government financial reporting is lacking and existing standards have not been implemented consistently. This research method uses quantitative data by distributing questionnaires. The population in this study is the Regional Government of Brebes Regency with a total sample of 40 SKPD offices, and the determination of samples based on Purposive sampling with the criteria of officials of each SKPD who have the authority to record, compile and report on financial local government.*

*The application used to process data is SPSS 25. The method used is the classic assumption test, hypothesis testing and multiple regression analysis. Based on the analysis conducted, the results show that Human Resource Capacity and the Government's Internal Control System have a positive effect on the Quality of Information on Local Government Financial Statements. Application of SAP, Use of Information Technology, and Financial Supervision does not affect the Quality of Information on Local Government Financial Statements.*

*Keywords: Human Resource Capacity, SAP Application, Information Technology Utilization, Internal Control System, Financial Supervision, Information Quality of Local Government Financial Statements.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah telah melakukan reformasi dalam upaya pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan transparan dengan mengeluarkan beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang isinya adalah mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada. Disamping itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi acuan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kemudian direvisi menjadi PP nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Yahya, 2006). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik, terhindar dari praktik yang selama ini menjadi masalah dalam proses transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah yaitu praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* harus pula ditegakkan dan dilaksanakan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Apabila kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang tercantum dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dapat disajikan dalam informasi laporan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, apabila tidak disajikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka akibatnya adalah potensi kekurangan daerah bahkan kerugian daerah, penerimaan yang berkurang, lemahnya administrasi, tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif dalam pengelolaannya.

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 542 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dan kendala di penerapan sistem dan opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Berikut adalah Data Opini LKPD Tahun 2016:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 378 (70%)
- b. Wajar Dengan Pegecualian (WDP) : 141 (26%)
- c. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) : 23 (4%)

Data diatas memang menunjukkan hasil yang baik untuk opini WTP dan telah mencapai target untuk kinerja keuangan daerah di bidang penguatan tata kelola

pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Namun melihat masih adanya opini WDP bahkan TMP untuk suatu pemerintah daerah ini merupakan masih terdapat penguatan kinerja keuangan yang belum merata disemua pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Faktor lain yang menjadi kendala adalah bisa dari pemahaman terhadap sistem akuntansi itu sendiri, sistem pengendalian internal (SPI) dalam pemerintah daerah, meliputi lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?
5. Apakah Pengawasan Keuangan Pemda Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?
6. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda Berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Stewardship Theory***

Pengertian *Stewardship Theory* menurut (Donaldson dan Davis, 1991) *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa keadaan dan situasi yang membuat manajemen lebih mementingkan dan fokus kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Menurut (Segal dan Lehrer, 2012) menjelaskan bahwa teori ini menekankan pada perilaku steward yang tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal. Kondisi tersebut didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh steward. Sikap melayani merupakan sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan.

Makna dari *Stewardship Theory* dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola anggaran di pemerintah daerah diharapkan akan bekerja dengan sebaik baiknya untuk kepentingan prinsipal yaitu masyarakat dan instansi mereka. Sehingga pemerintah daerah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang semakin efektif.

## **Teori Agensi**

Pengertian Teori Agensi menurut Jansen dan Meckling, (1976) dalam Syarifusin, (2014) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang mempunyai hubungan antara pihak principal dan agen, dimana pihak principal sebagai pemilik mendelegasikan kepada agen atau pihak manajemen untuk melaksanakan tindakan/pekerjaan yang diinginkan oleh prinsipal.

Prinsipal dalam pemerintah daerah adalah rakyat/melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan agen adalah pemerintah daerah. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa dalam proses pendelegasian terdapat beberapa masalah karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal atau yang disebut dengan *agency problems*, perbedaan kepentingan tersebut juga dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi diartikan sebagai informasi yang tidak seimbang antara pihak agen (pemerintah) dan prinsipal (rakyat/DPRD).

Makna dari Teori Agensi tersebut adalah dalam prakteknya pelaporan keuangan pada pemerintah daerah didasari teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat sebagai informasi bagi para pengguna / *stake holder*, dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal yang berhak menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, politik berdasarkan informasi tersebut. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin, 2011).

## **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum, 2009). Menurut Notoatmodjo (2003), ukuran sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan, dan tingkat pengalaman. Tingkat pendidikan dibagi menjadi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pelatihan yang diberikan oleh tenaga ahli dibidangnya sesuai dengan materi dan kebutuhan dan pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

## **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi merupakan acuan yang menjadi pedoman serta prinsip-prinsip dalam perlakuan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak pemakai laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah pedoman dan prinsip yang diterapkan dalam proses pencatatan, penyusunan hingga penyajian laporan keuangan pemerintah dan



menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan dari pengertian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa standar tersebut merupakan acuan dan prinsip yang wajib dalam proses akuntansi mulai dari pencatatan, penyusunan hingga pelaporan keuangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah serta menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Standar akuntansi pemerintah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, CaLK, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan, Laporan Keuangan Konsolidasi, dan Laporan Operasional.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sedangkan menurut PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik.

Menurut Wilkinson (2005), mendefinisikan Teknologi Informasi ini merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyampaian informasi. Teknologi informasi meliputi komputer, *software*, database, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengertian sistem pengendalian intern pemerintah yaitu: Pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam upaya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIP menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan

pemerintahan diberbagai negara yang meliputi; Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

### **Pengawasan Keuangan**

Pengawasan keuangan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dimulai pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*).

Indikator yang digunakan adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta melakukan evaluasi kegiatan, transaksi dicatat berdasarkan bukti dan tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan pelaksanaan tugas, serta laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

## **Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki pengertian sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode”. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi indikator kualitas laporan pemerintah daerah adalah sebagai berikut; Relevan (Informasinya dapat memengaruhi keputusan untuk koreksi atas masa lalu atau memprediksi masa depan), Andal (Dapat Diverifikasi), Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

H<sub>2</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

H<sub>4</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

H<sub>5</sub>: Pengawasan Keuangan Pemda berpengaruh Positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H<sub>6</sub>: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden dengan jenis pernyataan yang bersifat tertutup. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 SKPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu adalah dengan memberikan kriteria tertentu kepada calon responden atau narasumbernya. Adapun kriteria yang dimaksud adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai wewenang dalam proses penyusunan

laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Brebes, yaitu pada bagian akuntansi/keuangan, dimana pejabat yang dimaksud adalah kepala bidang/kepala bagian serta sekretaris bidang/bagian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data Uji Validitas, Reliabilitas, Analisis Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji F.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden

**TABEL 4.2**

Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-Laki	22	61,1 %
Perempuan	14	38,9 %
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100 %</b>

**TABEL 4.3**

Responden berdasarkan Usia

Umur Responden	Frekuensi	Presentase (%)
21-30 Tahun	4	11,1 %
31-40 Tahun	16	44,4 %
41-50 Tahun	5	13,9 %
51-60 Tahun	11	30,6 %
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100 %</b>

**TABEL 4.4**

Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SLTA	2	5,5 %
D3	2	5,5 %
S1	29	80,6 %
S2	3	8,4 %
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100 %</b>

**TABEL 4.5**

Responden berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja	Frekuensi	Presentase (%)
< 1 Tahun	1	2,8 %
1-10 Tahun	19	52,8 %
11-20 Tahun	6	16,6 %
21-30 Tahun	8	22,2 %
31-40 Tahun	2	5,6 %
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>100 %</b>

**Pengujian Instrumen Penelitian**

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Kuesioner yang dibagikan sebagai instrumen dalam pengelolaan data sebanyak 40 eksemplar. Kuesioner tersebut berisi item pernyataan yang terdiri dari 16 pernyataan tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), 23 pernyataan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2), 3 pernyataan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), 10 pernyataan tentang Sistem Pengendalian Internal (X4), 10 pernyataan tentang Pengawasan Keuangan (X5) dan 16 pernyataan tentang Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda (Y). Jumlah kuesioner yang kembali dan layak diuji sebanyak 36 eksemplar atau sebesar 90% dari total keseluruhan kuesioner yang disebar.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *product moment correlation* melalui program komputer yaitu SPSS 19 for Windows. Validitas dilakukan dengan cara membandingkan r-hitung dan r-tabel dengan ketentuan: jika r-hitung > r-tabel, maka data valid, jika r-hitung < r-tabel, maka data tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas, tidak terdapat butir pernyataan dalam kuesioner yang tidak valid.

**TABEL 4.6**  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel (sig 5%)	Keterangan
Kapabilitas Sumber Daya Manusia	Item 1	0,753	0,3202	Valid
	Item 2	0,753	0,3202	Valid
	Item 3	0,753	0,3202	Valid
	Item 4	0,356	0,3202	Valid
	Item 5	0,642	0,3202	Valid
	Item 6	0,697	0,3202	Valid
	Item 7	0,631	0,3202	Valid
	Item 8	0,656	0,3202	Valid
	Item 9	0,672	0,3202	Valid
	Item 10	0,483	0,3202	Valid
	Item 11	0,325	0,3202	Valid
	Item 12	0,583	0,3202	Valid
	Item 13	0,499	0,3202	Valid
	Item 14	0,563	0,3202	Valid
	Item 15	0,710	0,3202	Valid
	Item 16	0,637	0,3202	Valid
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Item 1	0,480	0,3202	Valid
	Item 2	0,410	0,3202	Valid
	Item 3	0,625	0,3202	Valid
	Item 4	0,542	0,3202	Valid
	Item 5	0,381	0,3202	Valid
	Item 6	0,484	0,3202	Valid
	Item 7	0,574	0,3202	Valid
	Item 8	0,504	0,3202	Valid
	Item 9	0,526	0,3202	Valid
	Item 10	0,501	0,3202	Valid
	Item 11	0,504	0,3202	Valid
	Item 12	0,511	0,3202	Valid
	Item 13	0,562	0,3202	Valid
	Item 14	0,374	0,3202	Valid
	Item 15	0,356	0,3202	Valid
	Item 16	0,676	0,3202	Valid
	Item 17	0,576	0,3202	Valid
	Item 18	0,608	0,3202	Valid
	Item 19	0,649	0,3202	Valid



Variabel	Butir	r hitung	r tabel (sig 5%)	Keterangan
	Item 20	0,637	0,3202	Valid
	Item 21	0,348	0,3202	Valid
	Item 22	0,508	0,3202	Valid
	Item 23	0,460	0,3202	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Item 1	0,907	0,3202	Valid
	Item 2	0,837	0,3202	Valid
	Item 3	0,853	0,3202	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Item 1	0,671	0,3202	Valid
	Item 2	0,651	0,3202	Valid
	Item 3	0,703	0,3202	Valid
	Item 4	0,705	0,3202	Valid
	Item 5	0,701	0,3202	Valid
	Item 6	0,762	0,3202	Valid
	Item 7	0,641	0,3202	Valid
	Item 8	0,595	0,3202	Valid
	Item 9	0,597	0,3202	Valid
	Item 10	0,748	0,3202	Valid
Pengawasan Keuangan Pemda	Item 1	0,686	0,3202	Valid
	Item 2	0,332	0,3202	Valid
	Item 3	0,618	0,3202	Valid
	Item 4	0,675	0,3202	Valid
	Item 5	0,852	0,3202	Valid
	Item 6	0,661	0,3202	Valid
	Item 7	0,619	0,3202	Valid
	Item 8	0,768	0,3202	Valid
	Item 9	0,694	0,3202	Valid
	Item 10	0,756	0,3202	Valid
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda	Item 1	0,784	0,3202	Valid
	Item 2	0,833	0,3202	Valid
	Item 3	0,760	0,3202	Valid
	Item 4	0,648	0,3202	Valid
	Item 5	0,773	0,3202	Valid
	Item 6	0,825	0,3202	Valid
	Item 7	0,828	0,3202	Valid
	Item 8	0,859	0,3202	Valid
	Item 9	0,879	0,3202	Valid
	Item 10	0,782	0,3202	Valid

Variabel	Butir	r hitung	r tabel (sig 5%)	Keterangan
	Item 11	0,856	0,3202	Valid
	Item 12	0,782	0,3202	Valid
	Item 13	0,440	0,3202	Valid
	Item 14	0,727	0,3202	Valid
	Item 15	0,757	0,3202	Valid
	Item 16	0,779	0,3202	Valid

Tabel dibawah ini menyajikan hasil uji reliabilitas dengan melihat Cronbach Alpha > 0,70.

**TABEL 4.7**

Hasil Uji Reliabilitas

Vaiabel	Cronbachs Alpha	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,879	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,848	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,829	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,869	Reliabel
Pengawasan Keuangan Pemda	0,832	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda	0,953	Reliabel

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Hasil Statistik Deskriptif

**TABEL 4.8**

Statistik Deskriptif

		Kapasitas SDM	Penerapan SAP	Pemanfaatan TI	SPIP	Pengawasan Keuangan	Kualitas LKPD
N	Valid	36	36	36	36	36	36
Mean		68.58	94.61	14.00	31.36	41.33	69.08
Std. Deviation		5.654	8.209	1.219	3.878	3.295	6.737
Minimum		56	80	12	23	36	60
Maximum		79	114	15	40	50	80

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

**Pengujian Uji Asumsi Klasik**

Normalitas untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

**TABEL 4.9**

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.18093593
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.093
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Multikolinieritas untuk menguji konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu. Dengan melihat nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka asumsi multikolinieritas terpenuhi.

**TABEL 4.10**

Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,443	2,260	Tidak ada multikolinieritas
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,422	2,372	Tidak ada multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,647	1,546	Tidak ada multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,502	1,992	Tidak ada multikolinieritas
Pengawasan Keuangan Pemda	0,561	1,783	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Heteroskedastisitas untuk melihat varian dari distribusi probabilitas ke seluruh pengamatan. Dengan melihat nilai sig > 0,05.

**TABEL 4.11**  
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.547	7.656		-.594	.557
Kapasitas SDM	.137	.119	.272	1.150	.259
Penerapan SAP	-.180	.084	-.518	-2.140	.387
Pemanfaatan TI	.985	.456	.422	2.158	.245
SPIP	-.144	.163	-.196	-.885	.383
Pengawasan Keuangan	.143	.181	.166	.790	.436

a. Dependent Variable: RES3

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

### Analisis Data (Uji Hipotesis)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berikut hasil uji regresi:

**TABEL 4.12**  
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.560	13.065		119	.906
Kapasitas SDM	.427	.203	.358	2.102	.044
Penerapan SAP	.034	.143	.041	.235	.815
Pemanfaatan TI	1.197	.779	.217	1.538	.135
SPIP	.651	.278	.374	2.341	.026
Pengawasan Keuangan	.025	.309	.012	.080	.937

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah  $Y_{\text{kualitas LKPD}} = 1,560 + 0,427\text{KapasitasSDM} + 0,034\text{Penerapan SAP} + 1,197\text{Pemanfaatan TI} + 0,651\text{SPIP} + 0,025\text{Pengawasan Keuangan}$

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 1,560; artinya jika Kapasitas SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan TI, SPIP dan Pengawasan Keuangan nilainya adalah 0, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda nilainya adalah 1,560.
- b. Koefisien regresi variabel Kapasitas SDM sebesar 0,427; artinya jika variabel independen lain lainnya tetap dan Kapasitas SDM mengalami kenaikan 1%, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda akan mengalami kenaikan sebesar 0,427. Koefisien bernilai positif artinya hubungan positif antara  $X_1$  dengan Y, semakin naik  $X_1$  maka semakin naik juga Y, berlaku juga untuk variabel independen yang lain dengan melihat koefisien regresi dari masing-masing variabel dan melihat apakah positif atau negatif.

### **Hasil Uji t**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan secara parsial. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05.

**Hipotesis 1:** Berdasarkan pada Tabel 4.12, pengujian variabel kapasitas SDM terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda menghasilkan nilai dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,044 ( $< 0,05$ ). Oleh karena nilai *p-value*  $<$

(0,05), maka H1 diterima yang berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**Hipotesis 2:** Berdasarkan pada Tabel 4.12, pengujian variabel penerapan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda menghasilkan nilai dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,815 ( $> 0,05$ ). Oleh karena nilai *p-value*  $> (0,05)$ , maka H2 ditolak yang berarti bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**Hipotesis 3:** Berdasarkan pada Tabel 4.12, pengujian variabel pemanfaatan TI terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda menghasilkan nilai dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,135 ( $> 0,05$ ). Oleh karena nilai *p-value*  $> (0,05)$ , maka H3 ditolak yang berarti bahwa pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**Hipotesis 4:** Berdasarkan pada Tabel 4.12, pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda menghasilkan nilai dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,026 ( $< 0,05$ ). Oleh karena nilai *p-value*  $< (0,05)$ , maka H4 diterima yang berarti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**Hipotesis 5:** Berdasarkan pada Tabel 4.12, pengujian variabel pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda menghasilkan nilai dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,937 ( $> 0,05$ ). Oleh karena nilai *p-value*  $> (0,05)$ , maka H5 ditolak yang berarti bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**TABEL 4.14**

Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	976.942	5	195.388	9.581	.000 <sup>b</sup>
	Residual	611.808	30	20.394		
	Total	1588.750	35			

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Dibuktikan dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemda.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )****TABEL 4.15**

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 <sup>a</sup>	.615	.551	4.516

Sumber: Hasil olah data primer diolah oleh peneliti, 2019

Nilai *Adjusted R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,551 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel independen kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan pemda mampu menjelaskan variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan pemda sebesar 55,1% sedangkan sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Kapasitas sumber daya manusia yang meliputi tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman yang baik akan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes telah memadai dalam upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemda. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, semakin baik kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Brebes.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda**

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.



Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya penerapan standar akuntansi pemerintah yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal dan tidak merata tiap SKPD. Hal ini dibuktikan dengan berdasar hasil dari jawaban responden atas pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang kurang, sehingga jawaban atas pernyataan dalam kuesioner yang menunjukkan hasil masih terdapat responden yang menjawab “Tidak Pernah”, “Jarang” dan “Kadang-Kadang” dengan masing-masing 2,4%, 1,1% dan 6,6%.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda**

Tujuan utama dari teknologi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi didalam organisasi pemerintah daerah (Muslichah, 2002). Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok (Kadir, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data.

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal, menyeluruh dan belum merata tiap SKPD. Hal tersebut berbeda dengan jawaban responden atas penryataan kuesioner mengenai penggunaan komputer, software, dan jaringan internet bahwa responden telah mampu menggunakan instrumen dari teknologi informasi.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya sistem pengendalian internal yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes telah memadai dan mampu dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemda. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden atas poin pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam kuesioner hampir keseluruhan responden menjawab ada, paham dan dilaksanakan sistem pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian dan pengelolaan risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan.

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Pemda terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda**

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang tujuannya untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 51 Tahun 2010). Pengawasan keuangan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas, artinya pengawasan keuangan yang dilakukan dalam pemerintah daerah kabupaten Brebes belum sepenuhnya optimal, menyeluruh dan belum merata tiap SKPD. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada jawaban responden yang masih terdapat jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju dan Tidak Tahu atas pernyataan kuesioner mengenai keterlibatan anggota dewan dalam pengawasan keuangan pemda, evaluasi yang dilakukan, permintaan keterangan laporan pertanggungjawaban, dan tindak lanjut apabila menolak laporan pertanggungjawaban.

**Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerinta Daerah secara simultan.**

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan bahwa terdapat pengaruh variabel Kapasitas SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda terhadap variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama(simultan).

Hal tersebut menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang cukup memadai dan berkualitas di lingkup pemda kabupaten Brebes, penerapan standar akuntansi pemerintah yang mulai perlahan dilaksanakan, pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dimanfaatkan dengan baik, serta sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan keandalan,

ketepatanwaktuan dan kualitas laporan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten Brebes menjadi lebih baik.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kapasitas sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dikarenakan penerapan standar akuntansi yang ada belum sepenuhnya merata dilaksanakan dalam lingkup dinas-dinas pemerintah daerah kabupaten Brebes, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dikarenakan belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten Brebes baik software ataupun jaringannya, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda.
4. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin meningkat dan baik sistem pengendalian internal pemerintah maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dan baik juga.

5. Pengawasan keuangan pemda tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal belum dilakukan secara optimal dalam lingkup pemda kabupaten Brebes, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemda.
6. Kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan keuangan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini khususnya pada pemerintahan Kabupaten Brebes untuk terus meningkatkan pengawasan keuangan, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan membantu mengurangi risiko kesalahan material. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas obyek dan subyek penelitian, dan menambahkan variabel independen seperti sistem informasi akuntansi, audit

internal, komitmen organisasi dan faktor-faktor lainnya yang diduga memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desianawati K., Herawati N.T., & Sinarwati N.K. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Journal S1 Akuntansi*, 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2972>
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1991. "Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Asutralian Journal of Management*, 16:49-64
- Evicahyani, S.I dkk., 2016. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tabanan". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 5.3 Hal 403-428. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/14370>
- Efendi L., Darwanis, Abdullah S. 2017. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah" studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol 3. No. 2, September. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/8230>
- Friskianti, Y. & Handayani, B.D. 2014. "Accounting Analysis Journal", vol 3 (1), hal 361-369
- Ghozali, Imam. 2010. "Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlinda. 2016. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris kabupaten/kota provinsi riau". *Jurnal sorot Unri*, Vol 11 No. 2 Oktober, Hal 127-144. <https://media.neliti.com/media/publications/235061-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-361f27bf.pdf>
- Hasyim. R & Nadzir., 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinah Daerah dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru)". *Akuntabel*, 14 (1), 57-68
- Herman L A., Daswirman. 2017. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

*kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, studi empiris pada pemerintah kota payakumbuh. Jurnal Pundi, Vol 1 No.2, Juli.*

- Husna, F. 2013. "*Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris SKPD Pemerintah Kota Padang panjang)*". Skripsi. Universitas Muara Kudus.
- Ihsanti, E., 2014. "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*". Artikel UNP. Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1057>
- Kadir Abdul, 2002. *Pengenalan Sistem Informasi*, Penerbit Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Kadir, A. dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Kiranayanti, I. A.E & Erawati, N.M.A. 2016. "*Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16.2 Agustus (2016): Hal 1290-1318. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/18075>
- Madiguna, T. 2018. "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten karangasem*", E-Jurnal akuntansi universitas udayana, Vol 23.2, Mei, Hal 1253-1276. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/37277>
- Mahaputra, I P.U & Putra, I.W. 2014. "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8 (2): 230-244. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8146>
- Mansur, F. Prasetyo. E. Maiyami R. 2017. "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*" Journal of Applied Accounting and Taxation Vol.2 No.2 October 2017, 143-152.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3:2.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Modo, S.M dkk. 2016. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris kabupaten Talaud)*”. *Auditing Goodwill*, Vol 7 No 2, Februari.
- Muslichah. 2002. “*Pengaruh teknologi informasi, saling ketergantungan, karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial*”. *Jurnal Akuntansi Petra*. 4 (2), 106-125.
- Noto A., & Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurillah, A.S. & Muid, D. 2014. “*Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SKPD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD kota Depok)*”. *Skripsi Universitas Ddiponegoro*, 3, 1-13.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6099>
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 4286. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4437. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 4503. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 25. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2006. *Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kemendagri RI. Jakarta



- Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Lembaran Negara RI, No. 127. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kemendagri RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Kemendagri RI. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI, No. 110. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putri, R. D., 2017. "Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian inter terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18 (1), 19-39.
- Pratiwi, R.P. Adiputra, I.M.P. Atmadja, A.W.T., 2015. "Pengaruh pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah" (studi kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan)". *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3 No 1 Tahun 2015.
- Rahmawati, N., 2014. "Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di sekretariat DPRD kabupaten Malang berdasar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
- Rosalin, F. 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum pada BLU di Kota Semarang". Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Segal, L., & Lehrer, M. 2012. " *The Institutionalization of Stewardship: Theory, Propositions, and Insights from Change in the Edmonton Public Schools. Organization Studies*", 33 (2), 169-201.
- Sinaga, J. 2010. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>. Diakses tanggal 27 Juni 2019
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaningrum, T. 2012. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kuitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah*”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Surastiani, D.P dkk. 2015. “*Analisis faktor-faktor yang mempegaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah*”. *Jurnal Dinamika Unnes*, Vol 7 No 2, September, Hal 139-149.
- Wilkinson Joseph W. 2005. *Sistem Akuntansi dan Informasi*, Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Wilkinson, Joseph W. Et al., 2005. *Accounting Information System Essential Concept and Application, 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA*.
- Winindyaningrum & Rahmawati. 2009. “*Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi*”. Simposium Nasional XIII. Purwokerto. Vol 18 No 1.
- Yahya, Idhar. 2006. “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Vol 7, Oktober, No 4.

